



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

Perkembangan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Namun seiring dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang, diperlukan keberlanjutan dan perubahan kearah yang lebih baik (sustain and change) dari aktivitas pembangunan.

Berpijak pada upaya untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, baik dalam lingkup wilayah (keterpaduan pembangunan dalam konstelasi Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional) maupun lingkup waktu, maka diperlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Perencanaan pembangunan jangka menengah ini diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan.

Perubahan paradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional yang Dicanangkan melalui penetapan kebijakan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah) pada prinsipnya merupakan upaya untuk menata kembali dan mengedepankan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Terkait dengan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Selayar 2012-2032 serta berbagai dokumen perencanaan lain yang terkait. Dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi pedoman dan landasan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati. Dengan dilantikannya Bapak Muh. Basli Ali sebagai Bupati Kepulauan Selayar dan Dr. H. Zainuddin, SH., MH., sebagai Wakil Bupati Kepulauan Selayar pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka pemerintah Kabupaen Kepulauan Selayar mulai menyusun RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan Kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar 2012-2032 serta memperhatikan RPJMN 2015-2019. RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016-2021 selanjutnya diacu oleh seluruh SKPD di Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai tugas Pokok dan Fungsinya dan diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya visi dan misi tersebut diimplementasikan untuk menentukan strategi arah dan kebijakan pembangunan serta prioritas daerah dengan penjabaran sebagai berikut:

1. VISI

“ Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”

Visi Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2016–2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada periode perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi Kabupaten Kepulauan Selayar yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar pada



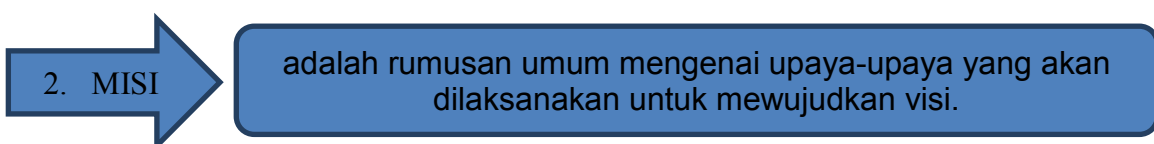
umumnya.

Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok visi yakni: 1) Masyarakat maritim sejahtera; 2) Nilai keagamaan; dan 3) Nilai kultural. “Masyarakat Maritim yang Sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “Nilai Keagamaan” dan “Nilai Kultural” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

“Masyarakat Maritim yang Sejahtera”, mengandung dua pengertian kondisi, yakni masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai masyarakat maritim, dan masyarakat Kepulauan Selayar sebagai masyarakat yang sejahtera. Dalam pokok visi ini tercakup berbagai fokus terkait kesejahteraan masyarakat dilihat dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor serta kesejahteraan sosial, keterpenuhan berbagai infrastruktur wilayah, hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam yang unggul, serta produktivitas dan daya saing daerah.

“Berbasis Nilai Keagamaan”, mengandung pengertian bahwa masyarakat Selayar dalam lima tahun ke depan akan semakin mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas dan rukun serta menempatkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan motivasi serta basis nilai utama dalam kehidupan.

“Berbasis Nilai Kultural” mengandung pengertian bahwa dalam lima tahun ke depan kebudayaan daerah akan semakin berkembang dalam merespon dinamika kebudayaan nasional dan global. Dalam pokok visi ini tradisi dan kearifan lokal ditempatkan sebagai unsur yang akan terlestarikan secara dinamis.



Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode lima tahun RPJMD 2016-2021, sebagai berikut:



1. Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi Dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh, dan Berkelanjutan.

Misi ini mencakup; Upaya-upaya dalam menciptakan situasi kondusif pada seluruh wilayah dan seluruh golongan masyarakat bagi kehidupan beragama; Membangun pusat kajian agama dan budaya; Mendorong pemenuhan sarana-prasarana dan fasilitas penyelenggaraan ibadah; Memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi, inspirasi dan nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan.

Misi ini mencakup upaya-upaya; Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bentuk menata struktur dan budaya organisasi serta sumber daya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintahan untuk bergerak secara sinergis dan produktif; Menerapkan *e-government* dalam peningkatan pelayanan publik; Meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) serta penerapan sistem *punishment and reward*; Meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat; Menjaga dan memelihara ketertiban serta ketenteraman dalam masyarakat; Melakukan upaya penegakan hukum secara terpadu; dan Membangun kesadaran politik; serta Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Misi ini berfokus pada upaya-upaya; Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya kualitas manusia. Tercakup didalamnya upaya-upaya pemberdayaan dan fasilitasi serta peningkatan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk keluarga berencana (KB) dan kesejahteraan keluarga; Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; dan Membina kegiatan kepemudaan, membudayakan, serta dan meningkatkan prestasi keolahragaan.

4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata.

Misi ini mencakup upaya-upaya; Pengembangan infrastruktur wilayah dan



peningkatan aksesibilitas dari dan ke Selayar, serta meningkatkan prasarana dan sarana transportasi dan perhubungan yang terintegrasi wilayah daratan dan kepulauan; Mempercepat peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, listrik, air, dan energi; khusus pengembangan jalan pada wilayah daratan pulau Selayar, diarahkan agar terkoneksi dan searah dengan pengembangan sektor-sektor strategis lainnya; Berkembangnya sentra-sentra Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta Kawasan Industri Perikanan Terpadu, dan menjadikan Selayar sebagai pusat budidaya ikan karang; Memberikan akses dan kemudahan berinvestasi; serta Mendorong kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Non Pemerintah dalam upaya mempercepat dan mengoptimalkan dukungan kebijakan untuk terealisasinya kebijakan dan program daerah yang telah ditetapkan.

5. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah.

Misi ini berfokus pada; Peningkatan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman, dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tercakup didalamnya upaya membangun sentra pengembangan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan; Meningkatkan kesadaran dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

6. Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan.

Misi ini berfokus pada upaya-upaya; Peningkatan produktivitas dari bidang usaha ekonomi yang berkembang khususnya yang berbasis kerakyatan. Tercakup di dalamnya upaya pengembangan keterampilan dan kemampuan teknis profesi berbasis teknologi pada masyarakat; Dukungan permodalan dan manajemen bagi usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan daya saing; serta Mencetak wirausahawan pada desa dan kelurahan.

7. Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan.



Misi ini berfokus pada; Strategi kebudayaan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal daerah Kepulauan Selayar. Di dalamnya tercakup upaya pelestarian tradisi, pembinaan sejarah lokal dan penguatan lembaga adat; Pembinaan kesenian daerah; serta pengelolaan cagar budaya dan museum.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan di tiap wilayah mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang berbasiskan perencanaan wilayah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah. Sesuai dengan arahan Presiden RI, strategi pembangunan juga mengacu pada paradigma pembangunan untuk semua (*Development for All*). Paradigma ini bertumpu pada 6 (enam) strategi dan arah kebijakan, yaitu:

Pertama, strategi pembangunan inklusif yang mengutamakan keadilan, keseimbangan dan pemerataan. Semua pihak harus ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui penciptaan iklim kerja untuk meningkatkan harkat hidup keluar dari kemiskinan. Seluruh kelompok masyarakat harus dapat merasakan dan menikmati hasil-hasil pembangunan terutama masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi harus dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Kedua, strategi pembangunan berdimensi kewilayahan. Strategi pembangunan wilayah mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, jaringan infrastruktur, kekuatan sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia yang menyebabkan pembangunan tidak sama untuk setiap wilayah. Dengan strategi ini, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah dan membangun keterkaitan antar wilayah yang solid termasuk mempercepat pembangunan jaringan listrik, penyediaan air bersih, serta pengembangan jaringan transportasi dan jaringan komunikasi untuk memperlancar arus barang dan jasa, penduduk, modal dan informasi antar wilayah.

Ketiga, strategi pembangunan yang mendorong integrasi sosial dan ekonomi antar wilayah secara baik. Kebijakan untuk memperkuat integrasi sosial dan ekonomi antar wilayah diarahkan pada pengembangan pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan di seluruh wilayah.



Keempat, strategi pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting dan mendesak sebagai upaya memperkuat daya saing perekonomian nasional. Peran pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan daerah pada intinya mempunyai arah sebagai berikut : (1) menciptakan suasana atau iklim usaha yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; (2) meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar; (3) mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang; (4) memperkuat kerjasama antar daerah; dan (5) membentuk jaring ekonomi yang berbasis pada kapasitas lokal dengan mengkaitkan peluang pasar yang ada di tingkat lokal, regional dan internasional; (6) mendorong kegiatan ekonomi bertumpu pada kelompok, termasuk pembangunan prasarana berbasis komunitas; dan (7) memperkuat keterkaitan produksi-pemasaran dan jaringan kerja usaha kecil-menengah dan besar yang mengutamakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah.

Kelima, strategi pembangunan disertai pemerataan (*growth with equity*) yang bertumpu pada keserasaian pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dalam menciptakan kesempatan kerja (*pro-jobs*) dan mengurangi kemiskinan (*pro-poor*) yang tetap berdasarkan kelestarian alam (*pro-environment*). Kebijakan pembangunan diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antar wilayah (*domestic interconnectivity*), membangun dan memperkuat rantai industri hulu hilir produk unggulan berbasis sumber daya lokal, mengembangkan pusat-pusat produksi dan perdagangan yang didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan SDM dan penyediaan air bersih; serta perbaikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.

Keenam, strategi pengembangan kualitas manusia. Orientasi pembangunan adalah peningkatan kualitas manusia (*the quality life of the people*) sebagai bagian dari penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sanitasi dan air bersih, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan dan jaminan keamanan. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan dasar termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sanitasi dan air bersih, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan dan jaminan keamanan terutama bagi masyarakat yang berada di daerah perdesaan, kawasan perbatasan dan daerah pasca



bencana. Dengan meningkatnya kualitas manusia, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dan membaik secara merata di seluruh wilayah.

Untuk mewujudkan Visi “Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural” maka dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dari setiap misi, yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
 Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dari setiap misi

NO	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi serta basis nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam segala aktivitas masyarakat	Internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitas kehidupan
		Meningkatkan kerukunan kualitas kehidupan beragama	Penciptaan kondisi yang kondusif dan toleran bagi pelaksanaan kehidupan beragama
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran
			Peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas manajemen aset daerah
		Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor	Penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah
			Peningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah



NO	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas manajemen Aparatur Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya penerapan <i>punishment dan reward</i>	Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis <i>merit system</i>
		Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas	Perbaikan dan penerapan Sistem dan Prosedur pelayanan publik
		Memelihara kondisi ketentraman dan ketertiban yang kondusif	Peningkatan kewaspadaan dan daya antisipatif terhadap kemungkinan munculnya tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
		Membuka kawasan baru untuk pengembangan transmigrasi lokal	Pembangunan dan pengembangan kawasan untuk penempatan transmigran lokal
		Meningkatkan integritas, kualitas, kapasitas, profesionalisme aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik	Penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparaturnya dan peningkatan kesejahteraan aparaturnya pemerintah desa
3.	Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi	Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin
		Meningkatkan daya beli masyarakat	Perbaikan income perkapita
			Pengendalian harga
			Perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita
		Menuntaskan penduduk buta aksara	Peningkatan pembinaan keaksaraan
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan	Peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan



NO	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
			yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan
		Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter	Internalisasi nilai-nilai moral terhadap peserta didik
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan tidak menular, serta kasus kekurangan gizi, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan
		Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga	Peningkatan kualitas keluarga
		Meningkatkan kualitas kesetaraan gender	Pemberdayaan dan pemberian kesempatan bagi kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan
		Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda	Peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda
		Meningkatkan pembinaan keolahragaan bagi pemuda dan masyarakat	Pembudayaan dan peningkatan prestasi keolahragaan
4.	Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor perikanan, kelautan dan pariwisata	Meningkatkan layanan jasa perhubungan dan transportasi	Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dan transportasi
		Meningkatkan kapasitas infrastruktur perhubungan dan transportasi	Penyediaan infrastruktur perhubungan baik darat, laut dan udara
		Meningkatkan kapasitas infrastruktur air dan irigasi	Pembangunan dan peningkatan bendungan dan jaringan irigasi



NO	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kapasitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Pembangunan dan peningkatan perumahan dan kawasan permukiman
		Meningkatkan kapasitas infrastruktur energi	Penyediaan energi listrik bagi rumah tangga dan industri
		Meningkatkan minat dan daya tarik wisata	Pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah
			Peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata
			Peningkatan sadar wisata bagi masyarakat
			Peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan
		Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau	Penyediaan infrastruktur kepelabuhanan Penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan
		Meningkatkan minat dan daya tarik investasi	Peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi dan jaminan kepastian hukum bagi investor
5.	Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah	Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian selatan Pulau Selayar sebagai KEK Pariwisata	Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian selatan Pulau Selayar)
		Menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan	Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan



NO	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu	industry perikanan terpadu
			Pembangunan infrastruktur utama dan pendukung Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara
			Pengembangan industri kapal rakyat
		Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan distribusi logistik	Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama pendukung kegiatan distribusi logistik pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian utara Pulau Selayar)
		Melaksanakan revolusi tani	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
		Melaksanakan pemurnian dan pembiakan ternak sapi	Penetapan Pulau Tanamalala sebagai pusat pemurnian sapi bali
			Penetapan Pulau Kalao sebagai pusat pembiakan sapi unggul
			Lokalisasi pengembangan usaha peternakan pada setiap kecamatan dan pembinaan pola usaha ternak rakyat
		Mengembangkan Kawasan Hutan Rakyat	Pemanfaatan lahan kritis sebagai kawasan konservasi hutan rakyat
		Membangun sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan	Penguatan kelembagaan nelayan
		Melaksanakan pembangunan sesuai daya dukung dan daya	Pelaksanaan pembangunan kawasan dan atau wilayah



NO	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		tampung lingkungan hidup.	berdasarkan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
6.	Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi terhadap layanan ketenagakerjaan
			Perluasan lapangan kerja
		Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan	Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan
7.	Mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui strategi kebudayaan	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam segala aktivitas masyarakat	Pengintegrasian tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam setiap aktivitas masyarakat dan kegiatan kesiswaan

Beberapa strategi dan Arah Kebijakan yang tersebut pada tabel menjadi pijakan utama penetapan dan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021.

C. PRIORITAS DAERAH

Mendasarkan pada kebijakan umum untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Visi: “Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural” maka dirumuskan fokus fokus program pembangunan yang dikelompokkan ke dalam setiap masing-masing Misi, yaitu:

Misi I :



Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan basis nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- Program Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan

Misi 2:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan

1. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Keuangan dan Aset Daerah
2. Program Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
5. Program Pembangunan Ketransmigrasian
6. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa

Misi 3:

Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat

1. Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pendidikan dan penyediaan lapangan kerja
3. Program Peningkatan Keaksaraan
4. Program Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan
5. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan
6. Program Pembangunan Keluarga Berencana /Keluarga Sejahtera
7. Program Pengarusutamaan Gender
8. Program Peningkatan Kemandirian Pemuda
9. Program Pembinaan Keolahragaan



Misi 4:

Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata

1. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Jasa Perhubungan dan Transportasi
2. Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Perhubungan dan Transportasi
3. Program Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Air dan Irigasi
4. Program Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. Program Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Energi
6. Program Pembangunan Kepariwisata
7. Program Peningkatan Layanan Jasa Perhubungan dan Transportasi
8. Program Peningkatan Investasi Daerah

Misi 5

Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah

1. Program Peningkatan Dukungan Terhadap KEK Pariwisata
2. Program Peningkatan Dukungan Terhadap Industri Perikanan Terpadu
3. Program Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Daerah
4. Program Revolusi Tani
5. Program Pembangunan dan Pengembangan Sentra Usaha Peternakan
6. Program Peningkatan Produksi Perikanan dan kelautan
7. Program Pengembangan Hutan Rakyat
8. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Misi 6

Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan

1. Program Pemerintahan Umum Tenaga Kerja
2. Program Pemerintahan Umum Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Koperasi, UKM

Misi 7

Mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui strategi kebudayaan.

- Program Pemerintahan Umum Kebudayaan Pendidikan